



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MEMPERKUAT KOMITMEN PERUBAHAN IKLIM MELALUI PRESIDENSI G20 INDONESIA

Teddy Prasetiawan

Analisis Legislatif Ahli Muda
teddy@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Krisis iklim merupakan permasalahan global yang memerlukan solidaritas antarnegara atas dasar sukarela (*voluntary*), penuh rasa tanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing negara atau sesuai dengan prinsip *common but differentiated responsibilities-respected capabilities*. Sayangnya, keseriusan negara-negara maju dalam mendukung penanganan krisis iklim tidak pernah mencapai tingkat yang optimal. Kepentingan nasional selalu menjadi dalih bagi negara maju, seperti halnya yang dilakukan Amerika Serikat yang menarik diri dari Paris Agreement pada 1 Juni 2017. Padahal peran negara-negara maju sangat penting dalam hal menyediakan sumber pendanaan dan alih teknologi yang akan digunakan untuk mitigasi dan adaptasi oleh pihak negara berkembang.

Namun, dinamika global tersebut tidak menyurutkan komitmen Indonesia dalam penanganan krisis iklim yang sejauh ini telah diakui oleh dunia internasional. Peran sentral, baik pada tingkat regional maupun internasional, kerap dilakoni Indonesia dalam berbagai forum yang mengusung tema perubahan iklim. Terlebih saat ini Indonesia didapuk memegang Presidensi G20. Momentum tersebut turut dimanfaatkan untuk meneguhkan kembali komitmen global terhadap isu perubahan iklim di tengah dunia yang sedang menghadapi pemulihan ekonomi pasca-Covid 19, konflik Rusia-Ukraina, dan ancaman krisis ekonomi-energi-pangan. Mengapa forum KTT G20 menjadi penting untuk menyuarakan isu perubahan iklim? Alasannya adalah negara-negara anggota G20 menguasai lebih dari 80% perekonomian dunia sekaligus merupakan negara emitor gas rumah kaca (GRK) lebih dari 80% total emisi dunia. Menyuarakan isu perubahan iklim di forum ini diyakini berdampak besar bagi penanggulangan perubahan iklim secara global.

Akhir Agustus lalu, Joint Environment and Climate Minister Meeting (JECMM) berlangsung di Nusa Dua, Bali. Indonesia berupaya untuk membangun konektivitas pembahasan yang dilakukan di COP 26 Glasgow dalam *agenda setting* KTT G20 mendatang dengan mengusung 3 (tiga) isu prioritas, yakni: mendukung pemulihan berkelanjutan, meningkatkan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim, serta mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim.

Secara khusus, reformasi aspek pendanaan iklim berkelanjutan akan menjadi perhatian banyak pihak, baik dari segi struktur pendanaan atau mekanisme penyaluran. Pendanaan iklim berkelanjutan dimaksudkan bahwa pendanaan tidak hanya bergantung pada komitmen negara maju saja, tetapi juga melibatkan sektor swasta. Namun, dalam forum ini diharapkan komitmen negara maju, utamanya anggota G20, untuk membiayai pengendalian perubahan iklim sebesar 100 miliar dolar per tahun akan kembali disuarakan. Hal ini sangat penting untuk menjamin terselenggaranya transisi energi bersih, peningkatan target nationally determined contribution (NDC), dan berbagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim lainnya oleh negara-negara berkembang.

Forum tingkat menteri, seperti halnya JECMM, menghasilkan *chair summary* yang akan dikompilasikan dengan hasil pertemuan tingkat menteri lainnya untuk menjadi satu deklarasi pada KTT G20 pertengahan November ini. Sikap Indonesia terhadap isu perubahan iklim sudah sangat jelas, yaitu menjamin bahwa isu ini akan menjadi bagian penting dalam deklarasi KTT G20 sehingga peran Indonesia selaku presidensi G20 dan peran Indonesia dalam menjembatani aspirasi negara berkembang kepada negara maju berlangsung dengan baik. Momentum G20 juga dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk menggali dukungan dan kerja sama yang lebih intensif dalam bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim melalui pertemuan bilateral dengan negara sahabat, seperti Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Kanada, Tiongkok, dan Jepang.

Di sisi lain, DPR RI melalui agenda Parliamentary Speaker's Summit (P20) yang akan diselenggarakan 5-7 Oktober 2022 mendatang perlu menyuarakan hal yang sama, isu lingkungan hidup dan perubahan iklim, melalui *agenda setting* dan *issue priorities*. Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, DPR RI perlu terus melakukan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah agar tidak kontraproduktif dengan komitmen global Indonesia pada isu perubahan iklim. Di antaranya adalah keseriusan Indonesia dalam transisi energi bersih yang terganjal dengan ketergantungan yang tinggi terhadap batu bara dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih relatif rendah. Di samping itu, perlindungan hutan, rehabilitasi lahan gambut, dan penurunan kejadian kebakaran lahan dan hutan harus tetap terus ditingkatkan, mengingat sektor kehutanan merupakan sektor dominan yang menguasai 60% dari target pengurangan emisi karbon Indonesia.

Atensi DPR

DPR RI perlu mengapresiasi peran pemerintah yang sejauh ini telah menyelenggarakan rangkaian forum tingkat deputi dan menteri bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim menuju agenda utama KTT G20. DPR RI menekankan bahwa selain menjalankan peran presidensi G20, pemerintah juga perlu menjalankan peran lainnya, yaitu sebagai negara berkembang yang memiliki potensi penyerapan karbon sangat tinggi sehingga dapat memperoleh *benefit* pendanaan iklim dalam membantu upaya Indonesia menanggulangi perubahan iklim. Melalui gelaran P20, DPR RI perlu mengarusutamakan isu lingkungan dan perubahan iklim dengan menjadikannya sebagai *issue priorities* P20. Pertemuan tingkat ketua parlemen negara-negara G20 (P20) yang diselenggarakan sebulan sebelum KTT G20 ini dapat dimanfaatkan oleh DPR RI untuk mendapatkan dukungan negara-negara G20 dalam rangka menyukseskan agenda KTT G20 dan pada akhirnya menghasilkan deklarasi yang memperkuat komitmen negara-negara maju dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.

Sumber

Bisnis Indonesia, 9 September 2022;
g20.org, diakses 13 September 2022;
Kontan, 8 September 2022; dan
Media Indonesia, 8 dan 13 September 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Pujana S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Riyadi Santoso
Sri Nurhayati Q.
Dian Cahya Ningrum
Venti Eka Satya
Nidya Waras Sayekti

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.